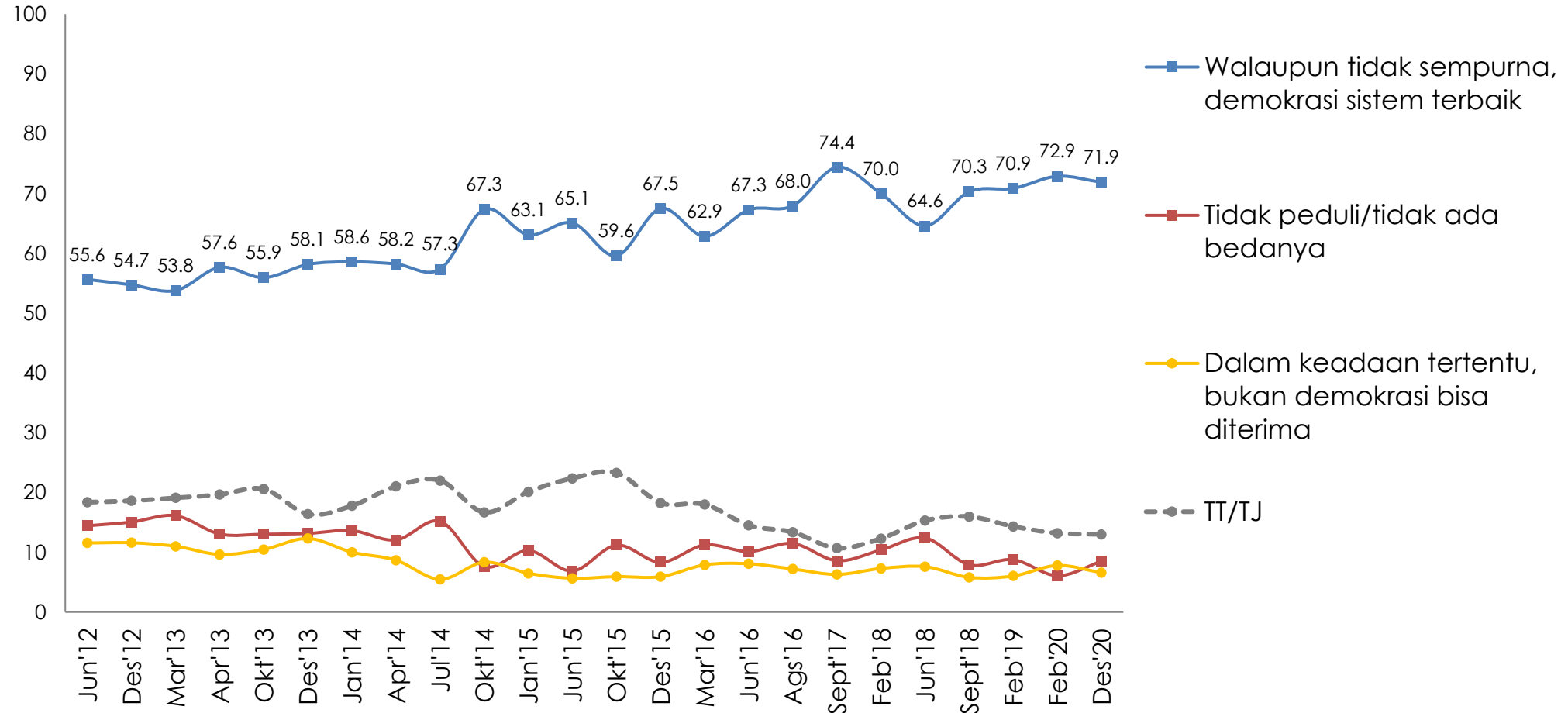


Tantangan Demokrasi dan Peran NGO di Indonesia

Oleh Rumadi Ahmad

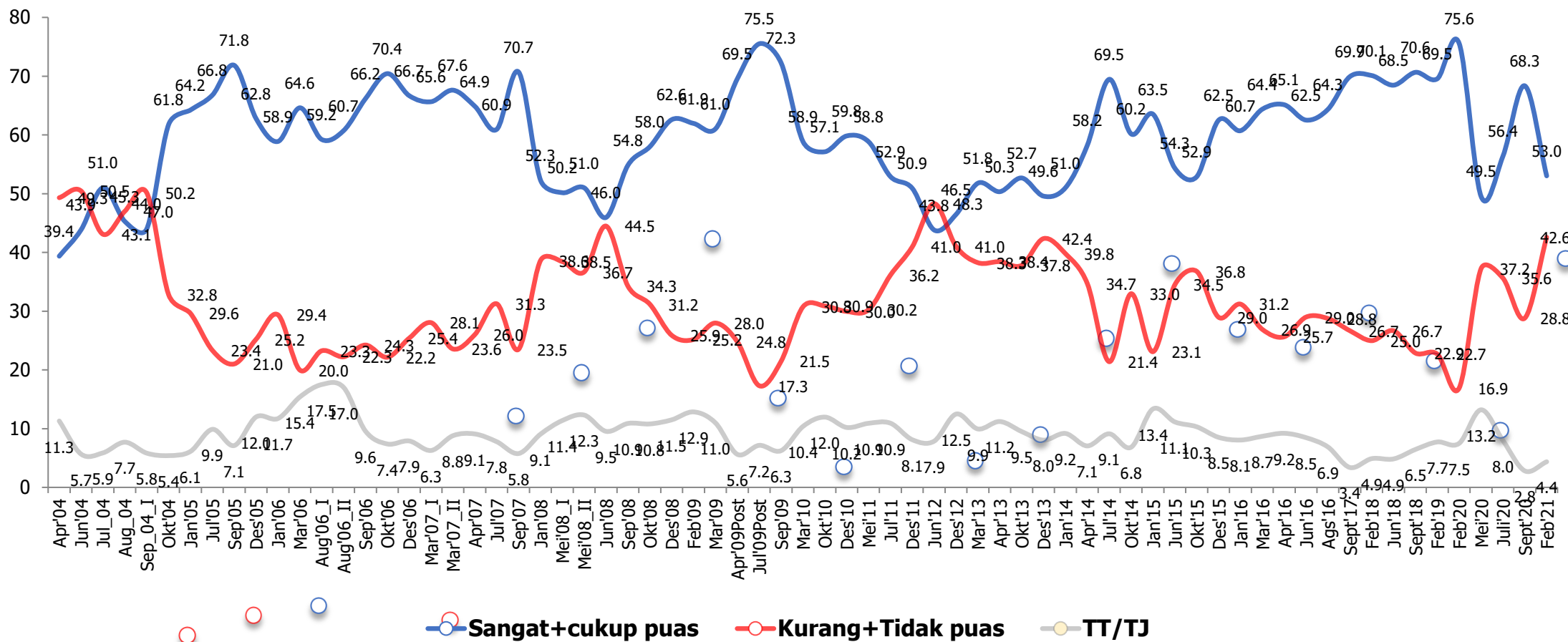
Tenaga Ahli Utama (TAU) Kantor Staf Presiden

TREN DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN



Sumber: Indikator, LSI, SMRC

TREN KEPUASAN ATAS KINERJA DEMOKRASI



Sumber: Indikator, LSI, SMRC

Ada kenaikan tingkat ketidakpuasan dengan pelaksanaan demokrasi dalam setahun terakhir

Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2021



Keterangan: Indeks demokrasi ditentukan berdasarkan lima variabel, yakni penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Indeks berada pada rentang 0-10. Semakin besar skor indeks, maka semakin baik.

Indeks Demokrasi Indonesia 2021 The Economist Intelligence Unit (2022)

Indeks Demokrasi 2021

10 Negara Tertinggi

Peringkat	Negara	Nilai Indeks
1	Norwegia	9,75
2	Selandia Baru	9,37
3	Finlandia	9,27
4	Swedia	9,26
5	Eslandia	9,18
6	Denmark	9,09
7	Irlandia	9,00
8	Taiwan	8,99
9*	Australia	8,90
10*	Swiss	8,90

10 Negara Terendah

Peringkat	Negara	Nilai Indeks
158	Guinea Khatulistiwa	1,92
159	Laos	1,77
160	Chad	1,67
161	Turkmenistan	1,66
162*	Suriah	1,43
163*	Afrika Tengah	1,43
164	Kongo	1,40
165	Korea Utara	1,08
166	Myanmar	1,02
167	Afghanistan	0,32

*Skor indeks sama

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

The Economist Intelligence Unit

NO.	INDIKATOR YANG TELAH BAIK	NILAI 0-10			
		2018	2019	2020	2021
1.	Proses pemilu dan pluralisme	6.92	7.92	7.92	7,92
2.	Fungsi Pemerintahan	7.14	7.14	7.50	7,86

NO.	INDIKATOR YANG MASIH KURANG	NILAI			
		2018	2019	2020	2021
1.	Partisipasi Politik	6.67	6.11	6.11	7,22
2.	Budaya Politik	5.63	5.63	4.38	4,38
3.	Kebebasan Sipil	5.59	5.59	5.59	6,18



Publikasi Terbaru Terkait Demokrasi Indonesia

Argumen: Demokrasi Indonesia berada pada titik terendah sejak Orde Baru. Meski telah berlangsung selama 20 tahun, konsolidasi demokrasi tidak terjadi dan justru mengarah pada *deepening illiberalism*.

Stagnasi telah dimulai akhir 2000-an. Memasuki masa regresi pada periode kedua pemerintahan SBY (Power & Warburton, 4)

Indonesia dinilai lebih 'sehat' dan stabil dibanding Thailand & Filipina dengan kemunduran demokrasi yang dramatis (Hicken, 28)

Indonesia "berkategori rendah" dalam probabilitas transisi ke rezim otokrasi – dibanding Filipina, Malaysia, dan India (Hicken, 33)

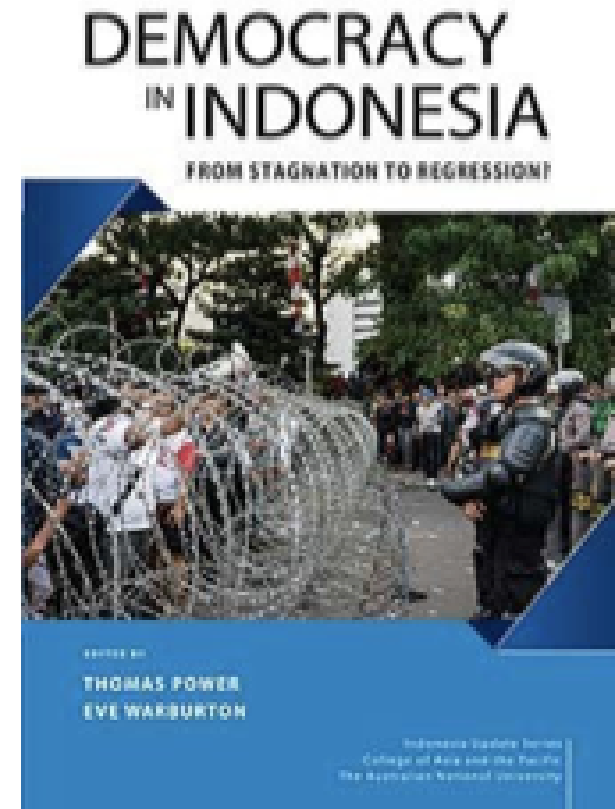
Indonesia mengarah pada *illiberal democracy*, di mana terdapat batasan serius terhadap kebebasan sipil dan supremasi hukum (Slater, 57)

Periode kedua Jokowi lebih berfokus pada mewujudkan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik bukan upaya mempertahankan demokrasi (Slater, 57)

Kasus Indonesia sejalan dengan tren penurunan kebebasan di seluruh dunia – mengarah pada situasi '*democracy in retreat*' (Setiawan, 255)

Peningkatan pengawasan individu dan pembatasan kebebasan berekspresi – baik oleh negara maupun organisasi sosial garis keras (Setiawan, 271)

Terjadi *executive-led illiberalism* di mana terdapat taktik represi dan anti-demokrasi, seperti penggunaan aparat penegak hukum untuk membatasi kritik terhadap pemerintah dan keglatan oposisi (Power, 278 & 298)



Thomas Power, Eve Warburton, eds., *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression* (Singapore: ISEAS Publishing, 2020)



Jeremy Menchik, “Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia” ASIAN STUDIES REVIEW 2019, VOL. 43, NO. 3.

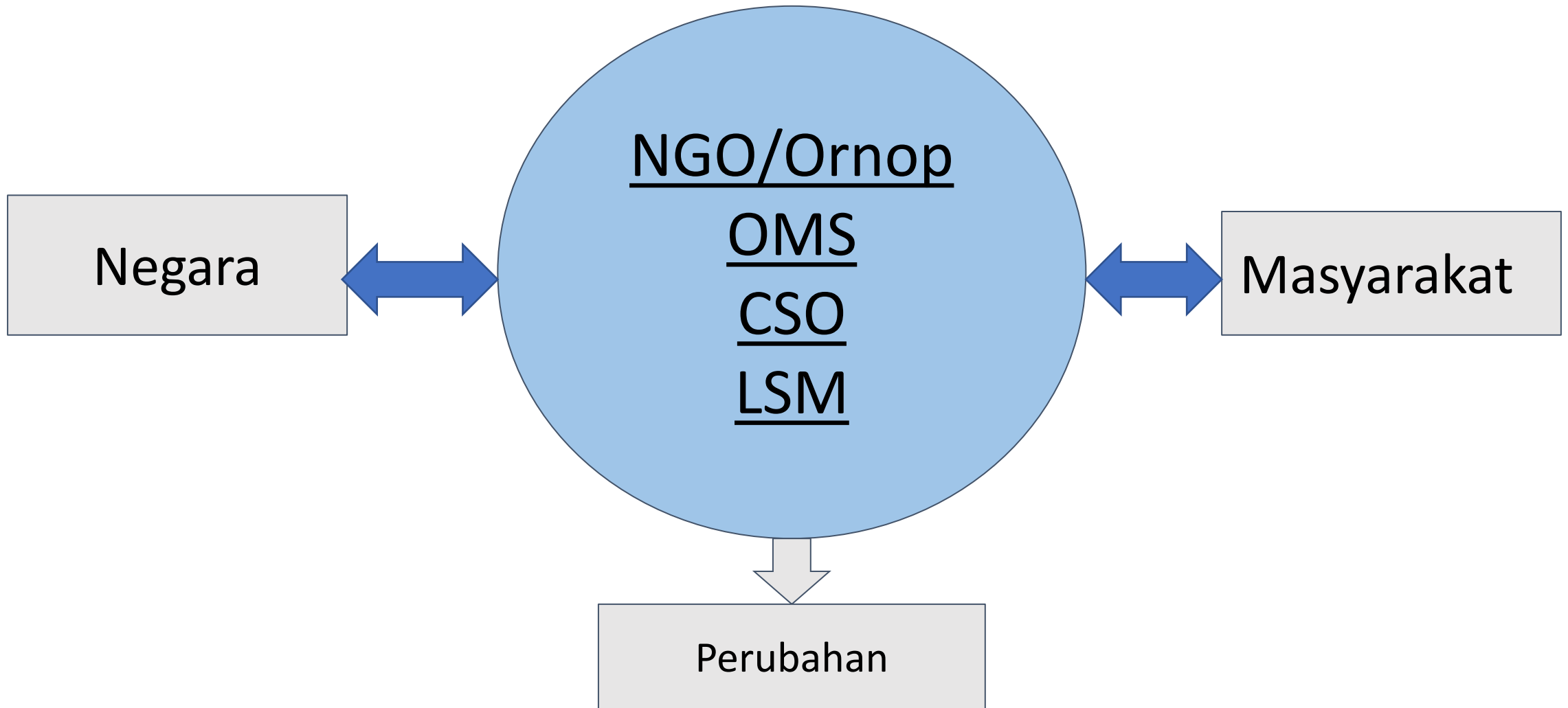
NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan utama Islam moderat Indonesia mempunyai peran penurunan kualitas demokrasi karena dalam kedua organisasi tersebut ada herarki nilai yang berwajah ganda: bisa digunakan mendukung demokrasi, pada saat yang lain mendukung otoritarianisme yang anti-demokrasi.

Thomas P Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2018.

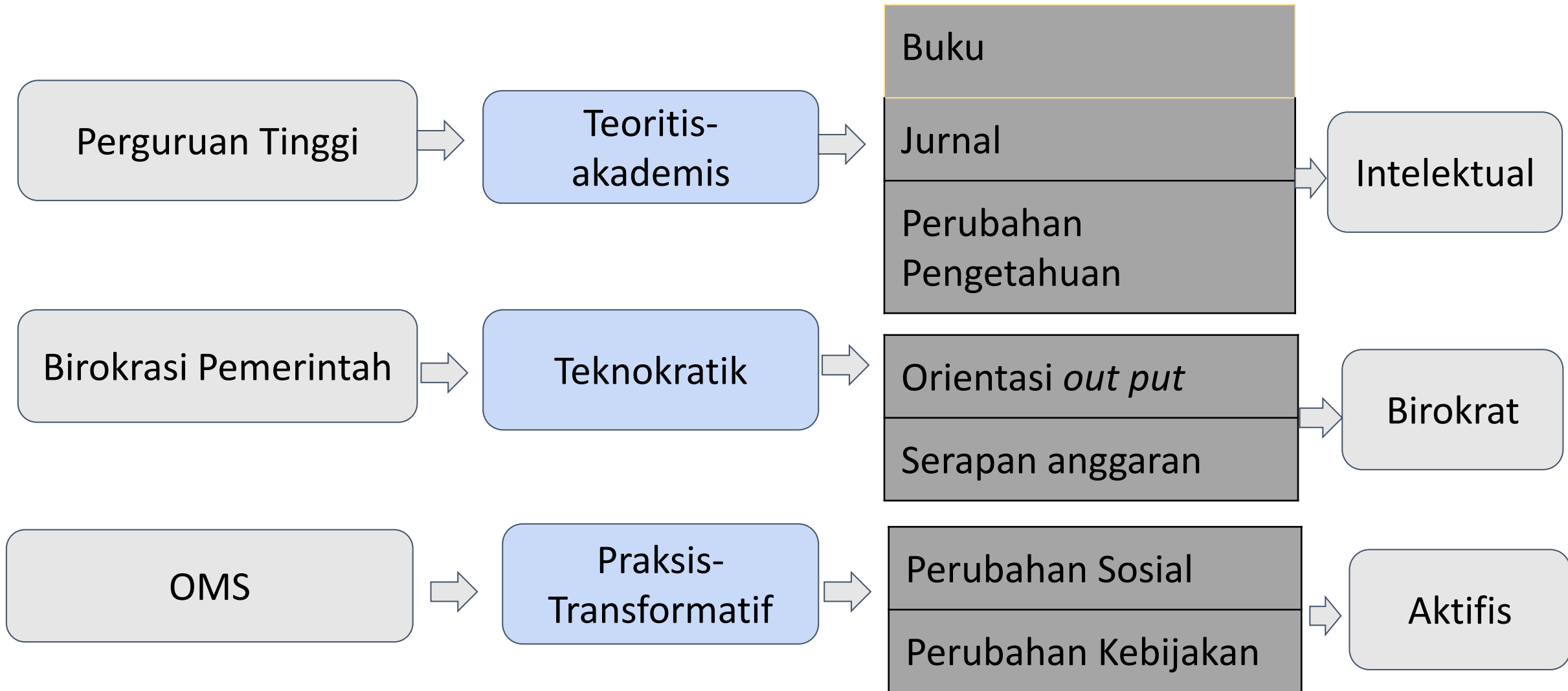
Kualitas demokrasi Indonesia menurun ditandai dengan penguatan dan legitimasi konservatisme dan anti-pluralism dalam politik. KMA dianggap sebagai simbol konservatisme dan anti-pluralism yang masuk dalam jantung negara.

Apakah terbukti?





Nalar Perubahan



Mengapa OMS?

- Memiliki keunggulan komparatif (dibanding organisasi pemerintah dan bisnis), seperti fleksibilitas, pendekatan partisipatoris, bekerja dg akar rumput, kegiatan efektif, berjejaring dsb.
- Sebagai *mediating structures*---jembatan antara negara dan masyarakat.
- Proliferasi NGO/OMS akan menghasilkan memperkuat masyarakat sipil dan proses demokratisasi.

Catatan Penutup

- Masyarakat Sipil yang kuat akan memperkuat proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi.
- Paradigma Relasi OMS dan negara bersifat dinamis. Oposisi atau kolaborasi.
- Kekuatan OMS sangat bergantung pada donor asing. Keuntungan atau kerugian?
- Isu-isu Gerakan OMS semakin beragam, meskipun ada benang merah yang mempertemukan.